

Kerjasama Ekonomi China-Indonesia di Era Presiden Joko Widodo sebagai Instrumen *Foreign Direct Investment* China

China-Indonesia Economic Cooperation in the Era of President Joko Widodo as an Instrument of China's Foreign Direct Investment

Sania Nusantari Setiawan & Arie Kusuma Paksi

Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 14 Januari 2024; Direview: 01 Februari 2024; Disetujui: 05 Mei 2024

*Corresponding Email: sanianusantar@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menganalisis kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam konteks *Foreign Direct Investment*. Di sektor investasi, China berada di posisi tiga besar bersama Singapura dan Hongkong sebagai negara dengan tingkat penanaman modal asing terbesar di Indonesia. Fokus penelitian mencakup kebijakan ekonomi Presiden Jokowi terhadap FDI, bentuk kerjasama ekonomi kedua negara serta dampak sosial dan politik Investasi China untuk Indonesia dengan asas kebermanfaatannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur ilmiah, kebijakan pemerintah, dan berita pers terkini serta dianalisis berdasarkan data sekunder untuk menggambarkan perkembangan kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia selama era pemerintahan Joko Widodo. Pemerintahan Joko Widodo telah mengimplementasikan kebijakan ekonomi demi meraih pemodal. Sistem Jasa Terstruktur Satu Pintu serta kebijaksanaan "Izin Investasi 3 Jam" menjadi langkah signifikan. Meskipun terdapat peningkatan ekonomi, terdapat tantangan ketidakseimbangan perdagangan dan isu investasi sehingga diperlukan kebijakan regulasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa Indonesia mampu meningkatkan perekonomiannya dengan andil menjalin hubungan bilateral, serta berdampak positif terhadap peningkatan kualitas teknologi melalui FDI China.

Kata Kunci: Kerjasama Ekonomi; Foreign Direct Investment; Indonesia; China; Joko Widodo.

Abstract

This article analyzes economic cooperation between China and Indonesia during the era of President Joko Widodo's administration in the context of *Foreign Direct Investment*. In the investment sector, China occupies the top three positions together with Singapore and Hong Kong as countries with the largest levels of foreign investment in Indonesia. The focus of the research includes President Jokowi's economic policy towards FDI, forms of economic cooperation between the two countries and the socio-political impact of Chinese investment in Indonesia based on the benefit principle. This research uses a qualitative descriptive approach by collecting data from various scientific literature, government policies and the latest press reports and analyzing it based on secondary data to describe the development of economic cooperation between China and Indonesia during the Joko Widodo government era. Joko Widodo's government has implemented economic policies to obtain capital. The One Stop Structured Service System and the "3 Hour Investment Permit" policy are significant steps. Even though there has been economic improvement, there are challenges from trade imbalances and investment problems, so regulatory policies are needed. This study concludes that Indonesia is able to improve its economy by contributing to establishing bilateral relations, as well as providing a positive impact on improving the quality of technology through Chinese FDI.

Keywords: Economic Cooperation; Foreign Direct Investment; Indonesia; China; Joko Widodo

How to Cite: Setiawan, S.N., & Paksi, A.K., (2024). Kerjasama Ekonomi China-Indonesia di Era Presiden Joko Widodo sebagai Instrumen *Foreign Direct Investment* China. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6 (4): 1408 -1420.



PENDAHULUAN

Kerjasama ekonomi adalah suatu proses kolaboratif antara negara-negara dengan tujuan meningkatkan perkembangan serta pembangunan ekonomi dengan cara garis besar. Cara ini melingkupi alterasi benda, pelayanan, modal, serta teknologi dampingi negeri buat mengiklankan khasiat ekonomi bersama. Fondasi kerjasama ekonomi internasional didasari oleh kepentingan tertentu dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengubah struktur kegiatan ekonomi nasional. Menurut (Wiwiek Rukmi Dwi Astuti & Laode Muhamad Fathun, 2020a) kerjasama ekonomi merupakan suatu bentuk interaksi antarnegara atau antarsubjek ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi melalui kolaborasi dalam berbagai aspek ekonomi. Kerjasama ini dapat melibatkan pertukaran sumber daya, teknologi, investasi, perdagangan, serta kebijakan kebijakan yang mendukung integrasi ekonomi. Dalam konteks globalisasi, kerjasama ekonomi menjadi penting untuk memperkuat keterkaitan antar negara, mendorong pertumbuhan bersama, dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.

Tujuan dari kerja sama ekonomi antarnegara mencakup pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan barang/jasa, ekspansi pasar hasil produksi, peningkatan produktivitas, peningkatan lapangan kerja, penambahan devisa negara, distribusi manfaat sumber daya, eksplorasi bidang bidang kerja sama baru, dan pengembangan kebijakan yang mendukung integrasi ekonomi yang lebih kuat. Berbagai bentuk kerjasama ekonomi internasional dapat diwujudkan melalui perjanjian perdagangan bebas, perjanjian investasi, dan perjanjian integrasi regional (Sulthon Sjahril Sabaruddin, 2016). Dengan demikian, kerjasama ekonomi menjadi landasan untuk membangun kesejahteraan bersama dan meningkatkan pembangunan geoekonomi yang berkelanjutan di tingkat global.

Konsep kerjasama ekonomi mencakup sejumlah aspek yang bersifat inklusif dan melibatkan komitmen bersama untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik. Pertama, kerjasama ekonomi mencakup integrasi ekonomi, yang melibatkan penghapusan atau pengurangan hambatan perdagangan dan investasi antarnegara. Kedua, konsep ini mencakup koordinasi kebijakan ekonomi untuk menciptakan sinergi dalam pengelolaan kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan. Selanjutnya, kerjasama ekonomi juga menyoroti adanya pertukaran pengetahuan dan teknologi antarnegara untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas. Keempat, konsep ini mengandung makna pembangunan infrastruktur dan proyek bersama guna memperkuat konektivitas dan memajukan sektor-sektor ekonomi.

Dalam hal kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia, kerjasama ekonomi telah menjadi fokus utama dalam hubungan kedua negara. Kedua negara ini memiliki sejarah panjang dalam hubungan ekonomi, dan kerjasama mereka telah berkembang pesat, terutama selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia telah mencakup berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan proyek proyek infrastruktur. Selain itu, kedua negara ini juga merupakan anggota G20 dan memiliki peran penting dalam ekonomi global (Wiwiek Rukmi Dwi Astuti & Laode Muhamad Fathun, 2020b)

Kebijakan ekonomi adalah serangkaian langkah atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk memengaruhi kinerja ekonomi suatu negara yang mana memiliki tujuan untuk mencapai berbagai sasaran ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, pemerataan pendapatan, dan penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ekonomi melibatkan berbagai instrumen, termasuk kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan struktural (Maria Magdalena Minarsih, 2011). Hal ini seringkali merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola aspek-aspek ekonomi suatu negara dan mencakup berbagai instrumen dan langkah-langkah yang dirancang untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi, termasuk pertumbuhan, inflasi, pengangguran, dan stabilitas mata uang demi menciptakan lingkungan ekonomi yang sehat, yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, stabilitas harga, dan kesejahteraan Masyarakat (Yulia Hafizah, 2016).

Konsep dasar dari kebijakan ekonomi meliputi dua pendekatan utama, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter (Yuliana Endang Kartika, 2023). Kebijakan fiskal berkaitan dengan penggunaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi. Penguasa



bisa mempraktikkan kebijaksanaan pajak ekspansif dan pajak kontraktif, semacam tingkatkan pengeluaran khalayak ataupun kurangi pajak, buat memicu perkembangan ekonomi serta menanggulangi masalah inflasi atau deficit anggaran. Sedangkan, kebijakan moneter melibatkan pengaturan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi. Bank sentral berperan penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Selain itu, kebijakan ekonomi juga mencakup kebijakan perdagangan, kebijakan industri, kebijakan ketenagakerjaan, dan kebijakan investasi. Kebijakan perdagangan bertujuan untuk mengatur aliran barang dan jasa antara negara-negara, sementara kebijakan industri bertujuan untuk mengembangkan sektor industri dalam negeri. Kebijakan ketenagakerjaan berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja, sedangkan kebijakan investasi bertujuan untuk menarik investasi asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks global, kebijakan ekonomi juga dapat mencakup kerjasama ekonomi antar negara, seperti perjanjian perdagangan bebas, kemitraan ekonomi, dan integrasi pasar. Tujuan dari kerjasama ekonomi ini adalah untuk meningkatkan akses pasar, memperluas kesempatan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang saling menguntungkan.

Penerapan kebijakan ekonomi di Indonesia, terutama selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, mencerminkan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan fiskal yang mendukung pembangunan infrastruktur, seperti proyek-proyek jalan dan pelabuhan, bertujuan meningkatkan konektivitas dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor terkait. Dikutip dari (M Nur Rianto Al Arif, 2023) meskipun dalam periode pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami peningkatan perekonomian yang dapat diapresiasi, masih ada beberapa tantangan terkait operasional dalam regulasi bisnis Indonesia contohnya perubahan kebijakan yang sering membuat investor asing sulit berinvestasi jangka panjang atau masalah hukum seperti kepemilikan tanah dan sengketa kontrak.

Foreign Direct Investment (FDI), atau Investasi Langsung Asing, mencerminkan upaya suatu negara untuk menarik modal dan teknologi dari investor asing dengan memberikan akses langsung ke sektor-sektor ekonomi domestik. Konsep ini melibatkan investasi jangka panjang yang memberikan kontrol langsung atau signifikan terhadap perusahaan atau aset di negara penerima investasi. Penanaman modal langsung mengambil andil dalam peningkatan ekonomi serta membina sektor non-migas yang berdaya saing di tingkat Internasional dan juga mencakup kemungkinan investor asing mengkaji manajemen dan kontrol dari perusahaan dalam negeri, khususnya dalam *corporate governance mechanism* (EP Nurina Devi, 2014).

Pemodalasan asing langsung ialah gerakan modal global di mana industri dari sesuatu negeri mendirikan ataupun meluaskan aktivitas usahanya di negeri lain. Karakter yang mencolok dari pemodalasan asing langsung merupakan keikutsertaan tidak cuma dalam pemindahan pangkal energi, melainkan pula pemberlakuan pengaturan. Dengan tutur lain, agen ataupun anak industri yang dibangun oleh industri asing tidak cuma mempunyai tanggung jawab keuangan kepada industri biangnya, namun pula ialah bagian integral dari bentuk badan yang serupa (Paul Krugman, 2000).

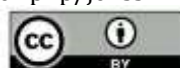
Investasi langsung asing (FDI) memiliki peran signifikan dalam perekonomian sesuatu negeri. Awal, modal asing bisa dipakai selaku instrumen buat memusatkan pemodalasan serta menggalakkan perkembangan ekonomi. Kedua, kenaikan perkembangan ekonomi butuh diiringi oleh pengembangan bentuk penciptaan serta perdagangan negeri itu (Sarwedi Sarwedi, 2022). Selanjutnya, modal asing berperan selaku alat buat menggerakkan anggaran yang memainkan kedudukan krusial dalam mendukung keberlanjutan ekonomi. Investasi asing langsung memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan jenis investasi lainnya. Pertama, umumnya investasi ini bersifat jangka panjang, memberikan keuntungan periodik kepada investor jika mereka dapat mengelola pabrik atau perusahaan dengan efisien. Kedua, investasi ini berkontribusi pada peningkatan pendapatan riil suatu negara dengan adanya investor yang menyuntikkan modalnya ke dalam perekonomian domestik. Ketiga, investasi asing langsung juga menciptakan lapangan kerja ketika investor mendirikan pabrik atau perusahaan di wilayah tersebut. Keempat, investasi ini berperan dalam transfer pengetahuan keterampilan manajerial yang bersifat kompetitif dan juga pengetahuan teknologi.

Kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia telah menjadi subjek yang menarik perhatian dalam konteks hubungan bilateral kedua negara. Kedua negara ini memiliki sejarah panjang dalam hubungan ekonomi, dan kerjasama mereka telah berkembang pesat, terutama selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Fokus utama dari pendahuluan ini adalah untuk mengeksplorasi peran kerjasama ekonomi ini sebagai instrumen untuk Foreign Direct Investment (FDI) China di Indonesia. Sejarah panjang tersebut membentuk landasan yang kuat untuk kerjasama kedua negara. Sejak kedua negara tersebut menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1950, kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. China dan Indonesia memiliki hubungan yang kuat dalam berbagai sektor, termasuk perdagangan, investasi, dan proyek-proyek infrastruktur (Reva Rinanda Siregar, 2016a).

Perubahan dalam bidang ekonomi merupakan hasil dari pengaruh globalisasi. Dalam fenomena ini, terlihat adanya hubungan erat serta ketergantungan dampingsi negeri, dengan kenaikan jumlah pelakon kebijaksanaan ekonomi yang bermaksud buat mendapatkan profit dalam kondisi ikatan global. Kenaikan aktivitas kebijaksanaan ekonomi pula dipicu oleh kesempatan menguntungkan di pasar global, yang sanggup membagikan partisipasi positif dalam meningkatkan serta memantapkan perekonomian dalam negara dalam waktu jauh. Oleh sebab itu, negara-negara di semua bumi, tercantum negeri bertumbuh, dengan cara intensif mengaitkan diri dalam kebijaksanaan ekonomi buat mempelajari peluang-peluang terkini, khususnya lewat kegiatan serupa multilateral serta bilateral.

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi di Indonesia, fokus utama telah diarahkan ke pembangunan nasional melalui berbagai proyek infrastruktur dengan adanya Belt Road Initiative yang dimana ialah penyempurnaan dari kebijakan One Belt One Road, perubahan sebutan ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahpahaman kata "one" dari acuan *One China Policy*. kebijakan BRI mendasar pembentukan kembali jalur sutra baik di darat maupun di laut. China merespons positif terhadap inisiatif ini karena sejalan dengan agenda Jalan Sutera Maritim Abad ke-21 (21st Century Maritime Silk Road). Wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, menjadi fokus dalam rencana Jalan Sutera Maritim Abad ke-21 sebagai bagian dari upaya untuk memperluas jaringan transportasi laut guna memfasilitasi proses ekspor-impor, dengan Indonesia menjadi salah satu target utama bagi China (Aditya Nugraha, 2022). Hal ini juga menjadi sangat strategis mengingat proyek BRI khususnya membangun infrastruktur dan tol laut. China telah menjadi salah satu negara yang melakukan investasi paling besar di sektor infrastruktur maritim. Investasi ini tidak terlepas dari fakta bahwa Indonesia menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan jalur perdagangan China. Selain itu, China pula ialah kawan kerja bisnis nonmigas terbanyak untuk Indonesia pada rentang waktu 2014. Keseluruhan ekspor nonmigas Indonesia menggapai 145, 96 miliar dolar AS pada rentang waktu itu, dengan ekspor ke Cina menggapai 16, 46 miliar dolar AS ataupun dekat 11, 28 persen dari keseluruhan ekspor nonmigas nasional. Selaku analogi, angka ekspor ke Amerika Serikat sebesar 15, 86 miliar dolar AS ataupun dekat 10, 86 persen dari keseluruhan ekspor nonmigas, sedangkan angka ekspor ke Jepang sebesar 14, 56 miliar dolar AS ataupun dekat 9, 98 persen dari keseluruhan ekspor nonmigas (Randi Sulaksana, 2019).

Foreign Direct Investment (FDI) merupakan wujud pemodalannya yang dicoba oleh investor dari satu negara ke perusahaan atau bisnis di negara lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang dan memperluas pengaruhnya di negara tersebut. FDI dapat dilakukan dengan cara memperoleh saham mayoritas atau mengembangkan bisnis di negara tersebut. Investasi asing langsung ini berbeda dengan investasi portofolio asing, di mana investor hanya memegang saham atau surat berharga dari perusahaan di negara lain tanpa memiliki pengaruh langsung pada operasi bisnis. FDI memiliki peran penting dalam integrasi ekonomi internasional karena dapat menciptakan hubungan yang stabil dan jangka panjang antara negara-negara. FDI juga dapat membantu transfer teknologi dan pengetahuan antara negara-negara, serta menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia telah menjadi tujuan investasi asing langsung yang menarik bagi investor asing, termasuk dari China. Dalam konteks kerjasama ekonomi China-Indonesia di era Presiden Joko Widodo, FDI menjadi salah satu



instrumen penting yang digunakan untuk memperkuat hubungan politik antara kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia (Reniza Helena Putri, 2022).

Dengan kehadiran Foreign Direct Investment (FDI), tidak cuma terjalin memindahkan pangkal energi, namun pula diaplikasikan pengawasan kepada industri asing. Riset (Azam & Ahmed, 2015), hal akibat FDI serta ekspor kepada perkembangan ekonomi di negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, Cina, serta Afrika Selatan) melaporkan kalau FDI serta ekspor membagikan akibat positif serta membuktikan terdapatnya ikatan positif 2 arah yang penting. Penemuan itu mengisyaratkan kalau FDI serta ekspor berfungsi selaku penganjur perkembangan ekonomi yang berkepanjangan. FDI mempunyai kedudukan yang genting dalam mendesak perkembangan ekonomi suatu negara. Selain menyediakan modal langsung, FDI juga membawa teknologi, manajemen, dan pengalaman bisnis yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing industri lokal. Dalam konteks hubungan China-Indonesia, perkembangan FDI China di Indonesia menjadi fokus penelitian untuk memahami kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional. Meskipun kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia menawarkan peluang besar, tantangan juga muncul. Dalam mengelola hubungan ini, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara mengoptimalkan manfaat ekonomi dan memitigasi risiko terkait, seperti dampak social, politik dan ketidakseimbangan perdagangan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi yang besar, memiliki peran strategis dalam rantai pasokan global. Keberhasilan Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang terus berkembang menjadikannya destinasi menarik bagi investor asing, termasuk China. Sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden pada tahun 2014, , kerjasama ekonomi dengan China menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan visi ekonomi nasional yang lebih tangguh serta keadaan social yang lebih baik tidak lain karena penanaman modal asing dari negara tirai bambu tersebut memperluas lapangan kerja bagi penduduk Indonesia khususnya masyarakat di daerah-daerah yang menjadi lokasi investasi serta kecerdasan teknologi yang lebih mumpuni akibat adanya *transfer* teknologi (Imam Mawardi, 2023). Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, mengatakan bahwa investasi China di Indonesia memberikan dampak signifikan yang berimbas pada hilirisasi industri dan pemerataan ekonomi serta lapangan kerja. Kemitraan strategis juga menghasilkan sejumlah capaian penting seperti konektivitas infrastruktur, kereta cepat Jakarta-Bandung, Ibu Kota Nusantara (Achmad Dwi Afriyadi, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada studi kasus kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya dalam konteks instrumen Foreign Direct Investment (FDI) yang berasal dari China. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial (Prof. Dr. H. Warul Walidin AK. et al., 2015). Dalam proses ini, peneliti menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks, yang kemudian dapat disajikan dengan melibatkan pelaporan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan. Penelitian ini juga dilakukan dalam latar *setting* yang alamiah, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang kejadian yang diamati.

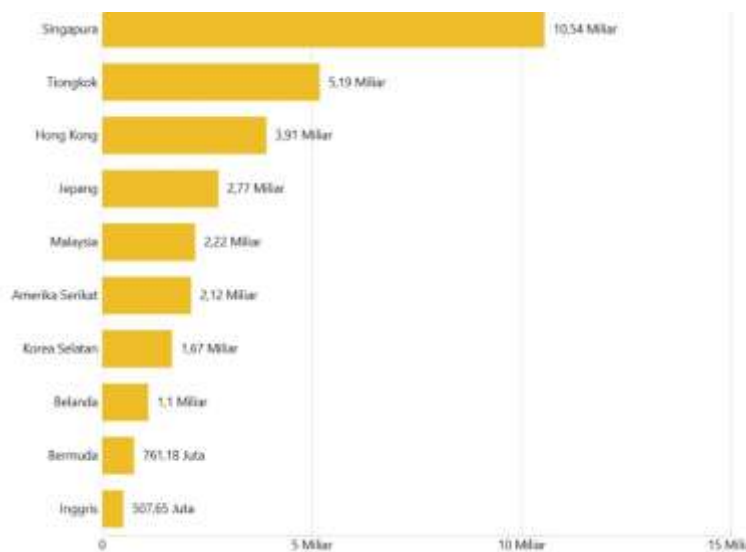
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam hal ini, data sekunder merujuk pada data yang diperoleh penulis melalui perantara atau tidak diperoleh secara langsung. Data yang dimaksud berupa studi pustaka terdahulu yang berhubungan dengan studi kasus yang diambil dalam penelitian serta berbagai buku, artikel, website dan arsip media digital berupa wawancara yang memuat persepsi para pemangku kepentingan terkait kerjasama ekonomi China dan Indonesia.

Proses pengumpulan dan kategorisasi data akan dilakukan dengan hati-hati dan sistematis, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang muncul dari data sekunder yang telah diseleksi. Analisis ini akan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi hubungan antara kerjasama ekonomi dan arus masuk FDI, serta dampaknya terhadap ekonomi dan pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Dengan demikian, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini akan memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan, pelaku bisnis, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam mengelola hubungan ekonomi antara China dan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Ekonomi Joko Widodo terhadap FDI China di Indonesia

Dalam menghadapi dinamika perekonomian global, setiap pemerintah di seluruh dunia diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam merumuskan kebijakan dan menetapkan prioritas pembangunan ekonomi guna mengurangi risiko yang mungkin dihadapi di masa depan. Pemerintahan Joko Widodo, menyoroti pentingnya memberikan perhatian khusus pada sektor investasi (Aly Mohammad Andloro Hanafi, 2022). Dilansir oleh data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia tahun 2022 mencapai US\$33,39 miliar. Negara yang berkontribusi paling besar dalam investasi asing adalah Singapura, dengan total US\$10,54 miliar atau 31,56% dari total PMA tahun sebelumnya. Tiongkok menempati peringkat kedua dengan realisasi PMA sebesar US\$5,18 miliar, diikuti oleh Hong Kong dengan US\$3,91 miliar, dan Jepang dengan US\$2,76 miliar. Hal ini menunjukkan komitmen dan minat kuat dari negara-negara tersebut dalam berinvestasi di Indonesia (Cindy Mutia Annur, 2023).



Gambar 1. 10 Negara dengan Realisasi Investasi Asing Terbesar di Indonesia

Sumber : (Cindy Mutia Annur, 2023)

Dari gambar 1, menunjukkan urutan peringkat 10 Negara dengan realisasi investasi asing terbesar di Indonesia, dalam kondisi tersebut menjelaskan bahwa China menduduki posisi kedua setelah Singapura dan berada 1 tingkat diatas Jepang. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi penanaman investasi Asing pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo khususnya dalam konteks hubungan erat kenegaraan Indonesia dengan China.

Dengan cara totalitas, bagus penguasa pusat ataupun penguasa wilayah sudah menerapkan serangkaian kebijaksanaan dengan tujuan tingkatkan keringanan berupaya serta memudahkan pemodal di Indonesia. Perihal ini dicoba buat tingkatkan tingkatan Ease of Doing Business (EODB) Indonesia. Dari semua susunan kebijaksanaan yang sudah dituturkan, penguasa tampaknya mempunyai fokus penting pada kenaikan keringanan dalam pengurusan perizinan serta kenaikan mutu layanan terpaut prasarana yang bisa mensupport penerapan pemodal di era kelak. Penguasa memutuskan sasaran buat tingkatkan tingkatan Ease of Doing Business (EODB) Indonesia, serta perihal ini sudah menciptakan bermacam pergantian dalam bentuk kebijaksanaan. Kepala negara Joko Widodo dengan cara langsung membagikan instruksi buat merevisi kebijakan-kebijakan yang mengarah membatasi pemodal. Sampai dikala ini, 16 dari kebijaksanaan itu sudah terealisasi, serta ini membuktikan kalau dalam durasi kelak, diperkirakan hendak terdapat lebih banyak kebijaksanaan terkini yang dikeluarkan. Walaupun kebijakan-kebijakan yang sudah dijabarkan lebih khusus terpaut dengan usaha penguasa buat tingkatkan tingkatan EODB Indonesia, berikutnya hendak dipaparkan sebagian kebijaksanaan yang dengan cara penting mempengaruhi energi raih penanam modal buat mendanakan di Indonesia. Sebagian kebijaksanaan itu pula mempunyai akibat yang lumayan besar kepada ketertarikan penanam modal, tercantum sistem Jasa Terstruktur Satu Pintu (PTSP), Permisi Pemodal 3 jam (Edward James Sinaga, 2017).

Pertama, PTSP, ataupun Sistem Jasa Terstruktur Satu Pintu, ialah layanan berintegrasi buat pengurusan permissi pemodal di bermacam zona. Diberlakukan semenjak Juni 2014 lewat Perpres Nomor. 97 tahun 2014, PTSP mempermudah permissi penanaman modal jadi 3 paket dengan cara 10, 25, serta 32 hari. Lewat PTSP, penanam modal memperoleh keringanan dengan integrasi pendapatan 19 perizinan serta non perizinan dalam satu tempat, membolehkan pengajuan permohonan dengan satu tahap di Tubuh Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sistem ini didesain buat tingkatkan energi raih penanam modal dengan mempermudah cara serta kurangi kerumitan dalam pengurusan permissi upaya ataupun pemodal di Indonesia (Halik, 2014).

Kedua, Kebijaksanaan "Permisi Pemodal 3 Jam" merupakan inisiatif penguasa buat memesatkan cara perizinan pemodal ataupun penanaman modal di Indonesia. Dengan komitmen penguasa pusat, permissi prinsip bisa diterbitkan dalam durasi 3 jam sehabis arsip komplis serta betul. Patokan buat permissi pemodal mengaitkan angka pemodal minimum Rp. 100 Miliar serta atau ataupun meresap daya kegiatan Indonesia (TKI) sangat sedikit 1.000 orang. Kebijaksanaan ini dibantu oleh Departemen terpaut serta Notaris di PTSP Pusat buat publikasi administrasi yang lain dengan cara paralel. Cara pengajuan permissi pemodal bisa dicoba di PTSP Pusat di BKPM Jakarta, dengan persyaratan kedatangan semua pemegang saham ataupun delegasi yang diwakili oleh salah satu pemegang saham (Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2016). Publikasi akte pendirian serta NPWP pula bisa ditindaklanjuti dengan cara simultan. Untuk industri yang memperoleh permissi pemodal di area pabrik khusus, mereka bisa mengawali pembangunan tanpa menunggu penanganan Izin Mendirikan Gedung (IMB) serta Permisi Area, memesatkan realisasi arsitektur.

.Dalam sambutannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional Indonesia, terdapat aspek yang perlu diperbaiki seperti biaya modal yang mahal dan birokratisasi yang lamban. Wakil Presiden berharap bahwa apabila upaya-upaya kebijakan diatas dilakukan dengan baik akan membuka peluang secara luas bagi perekonomian Indonesia. Hal ini berpotensi menghasilkan transfer teknologi yang akan meningkatkan kualitas sektor-sektor tersebut dalam hal pembangunan dan pemeliharaan. Dari segi penyediaan tenaga kerja, dampaknya akan mirip dengan pelaksanaan investasi pada umumnya, di mana semakin banyak sektor yang dibuka akan meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja.

Bentuk Kerjasama Ekonomi Antara Indonesia dan China Di Era Presiden Joko Widodo

Indonesia, sebagai negeri di Asia Tenggara, awal kali menjalankan ikatan diplomatik sah dengan Cina pada tahun 1950. Walaupun diawali pada rentang waktu itu, ikatan diplomatik antara

kedua negeri hadapi pasang-surut sepanjang 15 tahun awal. Pada kesimpulannya, pada tahun 1967, kedua negeri menyudahi buat membekukan ikatan diplomatik mereka. Dibutuhkan durasi 23 tahun buat membenarkan ikatan itu. Lewat penandatanganan MoU on the Resumption of Diplomatic Relations RI-RRT pada 8 Agustus 1990 di Jakarta, ikatan antara Indonesia serta Cina balik dinormalisasikan (Isya Mardhiyyah & Dadan Suryadiputra, 2023). Kemajuan positif dalam ikatan kedua negeri diisyarati dengan beberapa perjanjian kegiatan serupa di bermacam aspek yang ditandatangani oleh kedua pihak. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia dan China telah mengintensifkan kerjasama ekonomi melalui berbagai inisiatif. Salah satu langkah penting adalah partisipasi aktif dalam Belt and Road Initiative dan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Walaupun demikian, dinamika kerjasama ini tidak terlepas dari tantangan, seperti ketidakseimbangan dalam perdagangan dan beberapa isu terkait investasi (Prashanth Parameswaran, 2023). Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia dan China telah mengintensifkan kerjasama ekonomi melalui berbagai inisiatif. Salah satu langkah penting adalah partisipasi aktif dalam Belt and Road Initiative dan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Walaupun demikian, dinamika kerjasama ini tidak terlepas dari tantangan, seperti ketidakseimbangan dalam perdagangan dan beberapa isu terkait investasi (Prashanth Parameswaran, 2023). Selaku negeri yang jadi kunjungan awal Kepala negara Jokowi, Cina mempunyai maksud spesial dalam kondisi kebijaksanaan luar negara Indonesia. Sepanjang kunjungan itu, berhasil kesepakatan-kesepakatan penting antara kedua negeri. Salah satu ilustrasinya merupakan komitmen Jokowi buat berasosiasi dengan Cina dalam mendirikan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), suatu badan finansial global yang dipandu oleh Cina, spesialnya buat mendanai cetak biru prasarana. AIIB ditunjukan buat mensupport inisiatif Silk Road Cina, yang berpusat pada kenaikan ikatan di Asia, Timur Tengah, Afrika, serta Eropa.

Sejak Jokowi menjabat sebagai presiden pada Oktober 2014, Indonesia dan Tiongkok telah menandatangani 36 nota kesepahaman (MoU). Kesepakatan tersebut melibatkan berbagai sektor, termasuk perekonomian, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat bahwa di era pemerintahan Jokowi terdapat 36 MoU baru antara Indonesia dan Tiongkok. Penandatanganan 36 MoU antara Indonesia dan Tiongkok dalam periode waktu yang relatif singkat mencerminkan komitmen serius kedua negara untuk mempererat hubungan bilateral mereka (Aly Mohammad Andloro Hanafi, 2022).

Beberapa aspek yang menimbulkan kenaikan pemodaln Cina di Indonesia sepanjang kepemimpinan Kepala negara Joko Widodo salah satunya ialah peningkatan kerjasama pada bulan maret 2012, penguasa kedua negeri akur buat meningkatkan Program Pengembangan 5 Tahun antara Indonesia serta Cina dalam Kegiatan Serupa di Aspek Perdagangan serta Ekonomi buat rentang waktu 2013-2017. Perjanjian ini cocok dengan Konsep 5 Tahun ke-12 buat Pembangunan Ekonomi serta Sosial Nasional Republik Orang Cina serta Cetak biru Percepatan serta Ekspansi Pembangunan Ekonomi Indonesia. Indonesia mencermati pergantian penting dalam bentuk ekonomi Cina, yang hadapi peralihan dari sistem pemograman pusat yang tertutup kepada perdagangan global jadi sistem ekonomi yang mengarah pasar. Pergantian ini mendesak kemajuan zona swasta selaku pemeran penting dalam perekonomian garis besar. Usaha restrukturisasi ekonomi oleh penguasa Cina mengaitkan pengembangan pasar saham, kenaikan perkembangan zona swasta, serta kelangsungan kepada perdagangan asing serta pemodaln. Bagi informasi dari The World Bank Working for a World Gratis of Poverty pada 16 Juli 2010, Cina sukses mengerahkan pendapatan pemodaln asing langsung (foreign direct investment atau FDI). Informasi itu memantulkan kalau sepanjang 10 tahun terakhir, Cina sudah menyambut dekat 20 persen dari keseluruhan FDI ke negara-negara bertumbuh, lebih dari US\$100 miliar pada tahun 2008, terpaut dengan kesempatan pemodaln serta perkembangan pasar dalam negeri (Aly Mohammad Andloro Hanafi, 2022). Dalam perihal pemodaln Cina di Indonesia, pada umumnya cuma dekat US\$32, 43 juta saat sebelum akad AC-FTA, yang setelah itu bertambah jadi US\$59, 33 juta. Walaupun begitu, persentase pemodaln Cina kepada keseluruhan pemodaln bumi di Indonesia tidak hadapi kenaikan yang penting, cuma pada umumnya dekat 0, 006 persen, bagus saat sebelum ataupun sehabis akad AC-FTA. Situasi kemajuan ekonomi Cina jadi fokus atensi



global, paling utama sehabis negeri itu berasosiasi dengan World Trade Organization (Reva Rinanda Siregar, 2016) . Indonesia memandang kebangkitan ekonomi Cina selaku kemampuan kegiatan serupa penting, yang bersinambung di dasar kepemimpinan Kepala negara Joko Widodo sehabis lebih dahulu terangkai kegiatan serupa di masa Kepala negara Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi, kegiatan serupa ekonomi antara Indonesia serta Cina tidak bebas dari tantangan serta halangan. Prasarana yang mensupport serta mendesak perkembangan pemodalan di Indonesia dikira sedang kurang mencukupi, bagus dalam pandangan prasarana lunak semacam jasa, hawa upaya, serta kejelasan hukum, ataupun prasarana keras semacam pemindahan serta komunikasi. Birokrasi serta jasa di Indonesia pula ditaksir belum maksimal, serta kebijaksanaan pemodalan sedang belum berbarengan antara Penguasa Pusat serta Penguasa Wilayah, menghasilkan bobot bayaran yang besar.



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dalam 10 Tahun Terakhir

Sumber: (Mela Syaharani, 2023)

Dari gambar 2, menunjukkan hasil kenaikan persentasi kondisi ekonomi di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo khususnya dalam konteks hubungan erat kenegaraan Indonesia dengan China. Meski dalam kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan. Tingginya pertumbuhan ekonomi membuktikan peningkatan oersentase ekspor dan impor.

Keterbatasan Pendanaan Pemerintah Indonesia Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, guna menggapai sasaran pembangunan prasarana yang sudah diresmikan dalam Konsep Pembangunan Waktu Menengah Nasional tahun 2015-2019, dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 5. 452 Triliun. Tetapi, penguasa pusat serta wilayah cuma sanggup sediakan anggaran sebesar Rp. 1. 131 Triliun, meninggalkan beda pendanaan (*financing gap*) sebesar Rp. 4. 321 Triliun. Buat menanggulangi kekurangan itu, opsi pendanaan pengganti semacam Kegiatan Serupa Penguasa Swasta serta sumber-sumber pendanaan yang lain, semacam anggaran perbankan serta pasar modal, bisa diakses. Pimpinan Biasa Kamar Bisnis serta Pabrik (KADIN), Suryo Bambang Sulistio, mengatakan kalau anggaran yang dibutuhkan buat prasarana di Indonesia menggapai nilai yang amat besar, diperkirakan menggapai Rp. 1. 786 triliun. Ini tercantum peruntukan perhitungan buat prasarana penyediaan listrik serta tenaga sebesar Rp. 681 triliun, jalan kereta api sepur api Rp. 326 triliun, jalur raya Rp. 339 triliun, serta ICT Rp. 242 triliun. Oleh sebab itu, penguasa dihadapkan pada keinginan buat memakai pembiayaan pengganti (Joseph Ivanda Christianto, 2018) . Perkiraan McKinsey & Company melaporkan kalau Indonesia hendak membutuhkan pemodalan dekat US\$600 miliar dalam 10 tahun ke depan. Penguasa membenarkan kalau pembangunan prasarana tertahan oleh keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, buat memesatkan Pembangunan infrastruktur prasarana, pihak swasta wajib dilibatkan yang

mana dengan mempertimbangkan opsi pendanaan alternatif dengan menjalin kemitraan dengan negara lain, termasuk Cina. Keinginan anggaran buat pembangunan prasarana di Indonesia amat besar, paling utama bila dibanding dengan negara-negara Asia semacam Singapore, Jepang, Cina, serta India. Ketidakmemadaianya mutu prasarana Indonesia tidak cuma diakibatkan oleh permasalahan pendanaan. Berbelanja pemodal prasarana yang kecil sepanjang ini tidak lumayan buat mendanai pembangunan prasarana yang mengaitkan area Indonesia yang besar. Pengeluaran buat prasarana dari APBN tahun 2013 menggapai Rp. 203 triliun dari PDB. Dengan mengaitkan pangkal lain semacam APBD, BUMN, serta zona swasta, keseluruhan pengeluaran buat prasarana menggapai Rp. 438 triliun dari PDB. Oleh sebab itu, pembangunan prasarana di Indonesia sedang amat tergantung pada APBN serta APBD, sedangkan partisipasi zona swasta belum penting. Oleh sebab itu, langkah-langkah butuh didapat buat penuhi keinginan anggaran itu. Penguasa Indonesia sudah berusaha mendirikan sebagian badan pembiayaan. Dalam kondisi ini, salah satunya, Indonesia mengundang negara-negara semacam Cina buat bekerja sama serta mendanakan dalam pembangunan prasarana serta arsitektur, tercantum cetak biru pembangunan sepur kilat Jakarta-Bandung. Cetak biru ini dijalani tanpa memercayakan anggaran APBN, mengaitkan pemodalan dekat 5, 573 miliyar Dolar Amerika Serikat (AS) dari Asosiasi BUMN Indonesia serta Asosiasi Cina Railways, dengan desain business to business (Muhammad Yamin & Shellia Windymadaksa, 2017).

Dampak Sosial dan Politik Investasi China untuk Indonesia

Berdasarkan analisis penulis, ditemukan bahwa proses pengambilan keputusan diplomatik melibatkan banyak instrument, terutama dalam konteks kebijakan luar negeri. Keamanan dan kepentingan nasional merupakan kategori utama dalam menetapkan kebijakan strategis. Selain itu, pencarian terkait wilayah dan cakupan tujuan lain juga menjadi pertimbangan. Meskipun banyak faktor memengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri, hasil dari politik luar negeri tetap dapat diandalkan dan dapat direalisasikan untuk kepentingan nasional, selama konsekuensinya baik. Sebagai contoh, Allison menyatakan "Pemerintah akan memilih aktor yang memaksimalkan tujuan strategisnya" (Khanafi, 2021). Kerjasama bilateral yang dipimpin oleh suatu negara memiliki peran fundamental, karena kerjasama bilateral adalah interaksi antara dua negara yang terus dikembangkan (Djauhari Oratmangun, 2020). Dalam analisis kerjasama bilateral sosial politik antara china dan Indonesia selama masa kepemimpinan joko Widodo, penting untuk menghormati hak kedua negara untuk bekerjasama dalam bidang kehidupan negara lain. Sebaliknya, tujuan utamanya adalah mewujudkan perdamaian dan menciptakan nilai tambah yang mendukung hubungan bilateral. Kerjasama bilateral serta investasi asing langsung dari China memiliki dampak yang signifikan pada Indonesia. Investasi asing dari China ke Indonesia memiliki dampak yang signifikan, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia yang mana berupa suatu usaha guna meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaan atau jabatan melalui proses pendidikan dan pelatihan (Malayu S. P. Hasibuan, 2017). Sumber daya manusia merupakan asset utama yang berhubungan dengan efektivitas dan produktivitas suatu negara. Dengan kata lain, [eningkatan alokasi sumber daya manusia menjadi prasyarat mendasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mempersiapkan individu untuk menjawab tuntutan pasar kerja yang semakin kompleks, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing (Adinda Chika Tris Winanti et al., 2023).

Kedua negara naik Pemerintah Indonesia dan Pemerintah China sepakat meningkatkan kerjasama di bidang pelatihan tenaga kerja dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) mengacu pada hasil pertemuan bilateral yang dilaksanakan di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta. Pada pertemuan tersebut, Muchtar Luthfie, yang menjabat sebagai Sekertariat Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, menyimpulkan bahwa pelatihan tenaga kerja yang ditawarkan oleh China dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian para pencari kerja lokal, sehingga mereka lebih mudah diterima oleh pasar kerja Yuan Yunpeng, sebagai Wakil Menteri Sumber Daya dan Jaminan Sosial China, menekankan bahwa

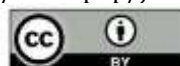


kunjungannya saat itu bertujuan untuk bertukar informasi dan pengalaman serta meningkatkan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama dalam hal penyerapan pengangguran di pedesaan dan jaminan sosial bagi tenaga kerja (Bambang, 2011). Sebuah Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama pelatihan vokasional berbasis industri telah ditandatangani oleh Komisi Pembangunan dan Reformasi China serta Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (RI) pada bulan November 2022. Program ini termasuk dalam Daftar Program Kerja Sama Konkret Forum Sabuk dan Jalur Sutra untuk Kerja Sama Internasional ketiga, yang diadakan pada bulan Oktober 2023. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Pusat Kerja Sama di bawah naungan Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional Tiongkok, dengan dukungan dari Yayasan Chen Jianghe dari Beijing. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong pertukaran dan transfer teknik serta pengalaman di bidang industri antara Tiongkok dan Indonesia. Kursus tahap pertama dari program ini telah selesai diadakan di Kota Suzhou, Provinsi Jiangsu, China timur. Kursus ini melibatkan 281 peserta dari Indonesia dan mencakup berbagai bidang, termasuk kecerdasan buatan (AI), industri internet, teknik robotika, manufaktur cerdas, dan mobil energi baru. Salah satu peserta asal Indonesia, Ari Susandy Sanjaya, menyatakan bahwa pengalamannya sangat berkesan dan membuka wawasan tentang Tiongkok. Mereka berencana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh saat bekerja di Indonesia. Kursus tahap kedua diselenggarakan di Institut Kejuruan Industri Shaanxi dengan fokus pada produksi baterai dan pengolahan aloi logam nikel. Selain mengadakan kursus, pihak penyelenggara juga mengatur kunjungan tur bagi para peserta ke sejumlah perusahaan dan pabrik di China agar mereka dapat melihat proses operasi dari dekat dan mengumpulkan pengalaman tentang manajemen industri (Warta, 2023).

Andi Yulianti Ramli, pejabat dari Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia (RI), menyatakan bahwa program pelatihan ini merupakan hasil penting dari kerja sama antara kedua negara. Kedua negara diharapkan dapat memperluas kerja sama di lebih banyak aspek. Akhirnya, program pelatihan vokasional tenaga kerja industri China-Indonesia 2023 berhasil diselesaikan dengan lulusan para peserta dari Indonesia yang mengikuti kursus tahap kedua di Kota Xianyang, Provinsi Shaanxi, China barat laut, pada Selasa, 14 November 2023. Selain itu, perlu dipahami bahwa Investor asing cenderung dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk iklim yang nyaman yang mencakup kestabilan politik dan ketegasan hukum terhadap mereka. Jika ketidakpastian terkait hal-hal ini ada, para investor akan ragu untuk berinvestasi karena mereka sensitif terhadap isu-isu semacam itu. Kestabilan politik, hukum, dan ekonomi merupakan kunci untuk menciptakan iklim yang menguntungkan bagi investasi.

SIMPULAN

Dalam kesimpulan, kerjasama ekonomi antara China dan Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mencapai perkembangan yang signifikan, terutama dalam hal investasi asing langsung (FDI). Peningkatan ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya tarik investasi dan memperbaiki iklim investasi di tanah air. Beberapa kebijakan ekonomi, seperti Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kebijakan "Izin Investasi 3 Jam," telah memberikan kemudahan bagi investor, termasuk mereka yang berasal dari China. Partisipasi aktif Indonesia dalam Belt and Road Initiative (BRI) China juga menjadi pendorong utama dalam meningkatkan kerjasama ekonomi kedua negara, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur besar. Diversifikasi hubungan ekonomi, termasuk potensi kerjasama di sektor-sektor seperti energi bersih, industri biokimia, kecerdasan buatan, dan perikanan laut, dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemitraan ini ke depannya. Semenjak terjalannya kegiatan serupa antara Indonesia dan Cina, ada dua anggapan, di mana Cina dikira lebih mengutamakan status quo atau justru menjadi bahaya bagi Indonesia sebagai daya revolusioner. Dalam hal ini, pemerintah perlu secara cermat menilai kembali tingkat keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap tahapan pelaksanaan proyek investasi yang melibatkan China. Jika pelaksanaan proyek ini dilakukan dengan bijaksana, maka hubungan ekonomi yang saling

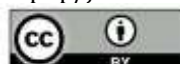


menguntungkan antara kedua negara dapat terus berkembang dan berkelanjutan.

Meskipun kerjasama ini membawa peluang besar, tantangan seperti ketidakseimbangan perdagangan dan isu terkait investasi perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan hubungan yang sehat. Pada akhirnya, penting untuk mencatat bahwa keputusan investasi China di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor politik, regulasi, dan stabilitas. Dengan pemilihan presiden baru di Indonesia pada tahun 2024, perlu adanya keterbukaan dan kesinambungan kebijakan untuk menjaga dan meningkatkan hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Dwi Afriyadi. (2023, December 5). Dampak Investasi China. Detik Finance .
- Adinda Chika Tris Winanti, Andien Talitha Alsafira, & Aloudya Nurfateeha Azzahra. (2023). Investasi Sumber Daya Manusia: Pentingnya Pendidikan di Indonesia. 3-6.
- Aditya Nugraha. (2022). Studi Kasus Kerjasama Internasional Antara Indonesia dan Republik Rakyat China Dalam Program Belt Road Initiative.
- Aly Mohammad Andloro Hanafi. (2022). Analisis Kepentingan di Balik Meningkatnya Investasi Tiongkok ke Indoneisa di Era Presiden Joko Widodo pada Tahun 2014-2019.
- Azam, M., & Ahmed, A. M. (2015). Role of human capital and foreign direct investment in promoting economic growth. *International Journal of Social Economics*, 42(2), 98-111. <https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2014-0092>
- Bambang. (2011). Indonesia - China Kerja Sama Pelatihan Tenaga Kerja. Antara News.
- Cindy Mutia Annur. (2023, January 10). 10 Negara Asal Investasi Asing Terbessar di Indonesia Tahun 2022. Databoks Katadata.
- Djauhari Oratmangun. (2020, December 22). Indonesia-China: Membangun Kemitraan, Sinergi, dan Solidaritas. Kompas.
- Edward James Sinaga. (2017). Upaya Pemerintahan dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Balitbang Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI*, 6(3).
- EP Nurina Devi. (2014). Penanaman Modal Asing. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2-10.
- Halik, A. (2014). Kajian Pengembangan Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Melalui Perspektif Indikator Kinerja Utama (IKU). *Jurnal Bina Praja*, 06(01), 41-50. <https://doi.org/10.21787/JBP.06.2014.41-50>
- Imam Mawardi. (2023). Pengaruh Investasi Asing Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya*, 7(2).
- Isya Mardhiyyah, & Dadan Suryadiputra. (2023). Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Tiongkok pada Masa Kabinet Kerja 2014-2019. *Journal Of International Realtion Universitas Padjajaran*, 5(1).
- Joseph Ivanda Christianto. (2018). HUBUNGAN TIMBAL BALIK PASAR MODAL CHINA DAN INDONESIA SERTA PERAN FAKTOR MAKRO EKONOMI (Studi di Pasar Modal Shanghai dan Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2018). Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2016, January 11). Program Izin Investasi 3 Jam Dorong Perekonomian Lebih Baik. Humas Ekon.
- Khanafi. (2021, July 11). Mengenal Teori Graham Allison Tentang Proses Kebijakan Luar Negeri dan Contohnya. Muda Bicara.
- M Nur Rianto Al Arif. (2023, November 8). Kebijakan Ekonomi Era Jokowi: Antara Keberhasilan dan Tantangan. Republika.
- Malayu S. P. Hasibuan. (2017). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara.
- Maria Magdalena Minarsih. (2011). Kebijakan Ekonomi Indonesia dan Internasional serta Tantangannya di Era Globalisasi. *Majalah Ilmiah Universitas Pandanaran*, 9(20), 2-3.
- Mela Syaharani. (2023, February 8). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam 10 Tahun Terakhir. GoodStats.
- Muhammad Yamin, & Shellia Windymadaksa. (2017). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sebagai Mercusuar Hubungan Indonesia-Tiongkok. *Politik Profetik*, 5(2), 200-218.
- Paul Krugman. (2000). *Capital Flows and the Emerging Economies: Theory, Evidence, and Controversies*. National Bureau of Economic Research.
- Prashanth Parameswaran. (2023, November). The future of Indonesia-China relations after Jokowi. GIS Report.



- Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., M., Dr. Saifullah, S. Ag. , M. Ag., & abrani. ZA, S. Pd. I. , M. S. I. , M. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory.
- Randi Sulaksana. (2019). Analisis Kerja Sama Kebijakan Poros Maritim Dunia Presiden Joko Widodo dengan Kebijakan 21st Century Maritime Silk Road. *International Relations Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 4–6.
- Reniza Helena Putri. (2022). Pengaruh Kebijakan Subsidi, Foreign Direct Investment (FDI) dan Tata Kelola Pemerintahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Negara - Negara di ASEAN). *Jurnal Manajemen Bisnis Islam* , 3(1), 124–125.
- Reva Rinanda Siregar. (2016a). Konsep Bantuan Luar Negeri Cina ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina). *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 50–59.
- Reva Rinanda Siregar. (2016b). Konsep Bantuan Luar Negeri Cina ke Indonesia sebagai Kedok Investasi (Studi Kasus: Implikasi Pengiriman Tenaga Kerja Asing Cina) . *Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 5(1), 50–59.
- Sarwedi Sarwedi. (2022). Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 4(1), 17–35.
- Sulthon Sjahril Sabaruddin. (2016). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional UNPAR*, 69–70.
- Warta. (2023, November 16). Pelatihan Vokasional Tenaga Kerja Industri China-Indonesia 2023 berhasil dituntaskan. *Wartabuana*.
- Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, & Laode Muhamad Fathun. (2020a). Diplomasi Ekonomi di Dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal of International Studies*, 5(1), 47–48.
- Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, & Laode Muhamad Fathun. (2020b). Diplomasi Ekonomi Indonesia di Dalam Rezim Ekonomi G20 pada Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 59–62.
- Yulia Hafizah. (2016). Kebijakan Ekonomi Indonesia Dintinjau dari Konsep Dasar Ekonomi Islam. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 4(2), 31–42.
- Yuliana Endang Kartika. (2023, December). Perbandingan Kebijakan Fiskal dan kebijakan Moneter: Dua Pendekatan Pemerintahan dalam Pengaturan Ekonomi. *Kompasiana Beyond Blogging*, 1–2.